
Pendidikan Politik Bagi Orang Asli Papua Guna Meningkatkan Partisipasi Politik

Fransin Kontu , Ransta Lekatompessy, Dapot Pardamean Saragih, Andri Irawan, Erwin Nugraha Purnama

Universitas Musamus, fransin@unmus.ac.id

Abstract

This research aims to understand and increase the political participation of indigenous Papuans through holistic and sustainable political education. The methods used include surveys, interviews, and participant observation to understand the social, political, and cultural context of indigenous Papuans. Research findings show that obstacles such as lack of access to political information, dominant political culture, and a low understanding of political rights are the main obstacles to their political participation. In response to these findings, a political education approach focused on the empowerment and inclusion of local communities was designed and implemented. This political education programme includes an understanding of political rights, political processes, participation in decision-making, and democratic values. The evaluation results show a significant increase in the political understanding and participation of indigenous Papuans after participating in this political education program. This research contributes to the development of political education strategies oriented towards local communities to increase their political participation and empowerment in the political process in Papua

Keywords

Political Education; Political Participation; Native Papuan; Political Rights.

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis, memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan pendidikan politik yang inklusif dan relevan bagi setiap komunitas, termasuk Orang Asli Papua. Masyarakat di Papua memiliki keunikan dalam budaya, bahasa, dan tatanan sosialnya, yang memerlukan pendekatan khusus dalam memberikan pemahaman politik. Pendidikan politik bagi Orang Asli Papua bukan hanya tentang mengenalkan sistem politik, tetapi juga tentang memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi nasib dan kehidupan mereka.

Dalam pandangan ini, pendidikan politik tidak hanya menjadi hak, tetapi juga alat pemberdayaan bagi Orang Asli Papua. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan hak-hak partisipasi, mereka dapat memainkan peran yang



lebih aktif dalam membentuk arah pembangunan di tingkat lokal dan nasional. Dalam bagian ini akan membahas urgensi pendidikan politik bagi Orang Asli Papua, menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dan potensi positif yang dapat dicapai melalui upaya pendidikan politik yang terarah dan berkelanjutan.

Papua, sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, menawarkan gambaran yang khusus dan dinamis dalam kerangka politik Indonesia. Orang Asli Papua, sebagai pemegang kearifan lokal yang unik, telah lama menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa ini. Meskipun demikian, tantangan dan kesenjangan dalam partisipasi politik masyarakat Orang Asli Papua masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa aspek yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Orang Asli Papua adalah ketidaksetaraan akses Pendidikan, tantangan ekonomi, isu Hak Asasi Manusia, pemberdayaan perempuan, serta budaya dan tradisi masyarakat adat Papua.

Pendidikan politik di antara Orang Asli Papua menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak-hak warga negara, dan peran mereka dalam masyarakat, Orang Asli Papua dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam membangun masa depan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menyelidiki signifikansi pendidikan politik bagi Orang Asli Papua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merinci solusi konstruktif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam ranah politik. Seiring dengan tuntutan global untuk pemberdayaan masyarakat orang asli Papua, pendidikan politik di Papua menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan dan mempromosikan keterlibatan aktif masyarakat orang asli Papua dalam pembentukan kebijakan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, upaya pendidikan politik harus disesuaikan dengan konteks lokal yang unik, mempertimbangkan keberagaman budaya dan kearifan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan Papua.

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, 1) Meningkatkan pemahaman Orang Asli Papua tentang sistem politik Indonesia, termasuk struktur pemerintahan, prinsip demokrasi dan mekanisme pengambilan keputusan. 2) Memberikan pengetahuan yang kuat tentang hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, hak berserikat dan hak menyampaikan pendapat. 3) Mendorong partisipasi aktif Orang Asli Papua dalam kegiatan politik, baik lokal maupun nasional, te. 4) Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis sehingga Orang Asli Papua dapat mengevaluasi informasi dengan bijaksana dan membuat keputusan yang informasional dan terinformasi. 5) Mendorong perkembangan kader pemimpin dari kalangan Orang Asli Papua yang dapat memimpin dan mewakili kepentingan masyarakat adat dalam konteks politik yang lebih luas

2. METHODS

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan Pendidikan politik. Melalui kombinasi dari kedua metode ini, selain memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam proses demokrasi, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang asli papua tentang system politi, hak-hak warga negara dan tatacara pengambilan keputusan sehingga merangsang partisipasi politik orang asli papua dalam system demokrasi di Indonesia.

Adapun untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat orang asli papua terkait partisipasi politik, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan survey terlebih dahulu dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat orang asli papua kemudian selanjutnya tim juga melakukan wawancara dan diskusi kelompok fokus dengan sejumlah kecil masyarakat orang asli papua untuk mendengarkan pandangan mereka.

Kemudian setelah kegiatan selesai, tim Kembali melakukan wawancara mengenai materi Pendidikan politik yang telah dilakukan. Setelah itu, tim juga meminta

pendapat para peserta kegiatan tentang dampak positif yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, termasuk didalamnya kritik dan saran untuk perbaikan kegiatan kegiatan yang sama di masa mendatang.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kampung Waninggap Nanggo yang merupakan kampung lokal dengan mayoritas penduduk adalah Orang Asli Papua dengan Tema “Pendidikan Politik Bagi Orang Asli Papua Guna Meningkatkan Partisipasi Politik”. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan survey dengan menyebarkan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan tentang Pemilihan Umum, Partai Politik, Partisipasi Politik dan Demokrasi kepada 20 orang warga dan wawancara terhadap aparatur Kampung Waninggap Nanggo dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kesadaran politik serta bagaimana pandangan mereka tentang partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Dari hasil survey yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya Orang Asli Papua di kampung Waninggap Nanggo masih tergolong rendah.

Selanjutnya tim melakukan Sosialisasi dan Pelatihan Pendidikan Politik dengan beberapa materi yaitu: Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Budaya Politik dan Partisipasi Politik.



a) Sosialisasi tentang Demokrasi dan Sistem Politik

Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang paling umum ditemui didunia ini. Dalam konteks demokrasi yang sehat, sistem politik haruslah transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga. Hal ini memerlukan kebebasan berbicara yang luas, akses informasi yang terbuka, proses politik yang adil dan inklusif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif bagi para pemimpin politik. Selain itu, partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari masyarakat sipil juga penting untuk memastikan bahwa sistem politik tersebut mewakili kepentingan seluruh rakyat dan bukan hanya segelintir elit politik atau ekonomi. Demokrasi juga memiliki tantangan dan kritiknya sendiri. Beberapa kritik terhadap demokrasi termasuk risiko populisme, manipulasi politik, korupsi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan ketidaksetaraan dalam akses politik. Sistem politik yang demokratis juga bisa menjadi kompleks dan lambat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi isu-isu yang kompleks dan mendesak.

Dalam sesi ini, materi disampaikan oleh Dr. Ransta Lekatompessy, M.Sc. dalam pemaparan materinya disampaikan pentingnya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem politik yang demokratis melalui reformasi institusi,

transparansi yang lebih besar, partisipasi yang lebih luas dari berbagai segmen masyarakat, pendidikan politik yang efektif, dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar warga negara. Demokrasi yang kuat dan inklusif adalah landasan yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

b) Sosialisasi tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum

Partai politik dan pemilihan umum merupakan dua aspek krusial dalam sistem politik demokratis. Partai politik merupakan organisasi yang mewakili berbagai pandangan politik dan bersaing untuk memenangkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Dalam sesi ini, materi disampaikan oleh Fransin Kontu, S.IP., M.Si, yang menjelaskan lebih lanjut tentang partai politik, pemilihan umum, dan peran keduanya dalam proses politik.

Partai politik merupakan entitas yang mewakili beragam pandangan dan kepentingan politik di dalam masyarakat. Mereka berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka, merumuskan kebijakan, dan bersaing untuk memenangkan dukungan publik dalam pemilihan umum. Setiap partai politik memiliki platform politiknya sendiri, yang mencakup pandangan atau ideologi mereka tentang isu-isu seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Partai politik juga memainkan peran penting dalam representasi politik. Mereka mencalonkan kandidat mereka untuk posisi politik seperti anggota parlemen, gubernur, walikota, atau presiden, yang kemudian akan mewakili pandangan dan kepentingan partai tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Melalui partai politik, warga negara dapat mengorganisir dukungan mereka untuk kebijakan tertentu, serta memobilisasi massa untuk mengambil bagian dalam proses politik.

Sementara itu, dijelaskan lagi mengenai Pemilihan Umum atau Pemilu yakni proses di mana warga negara memilih perwakilan mereka dalam lembaga-

lembaga pemerintahan. Ini adalah salah satu mekanisme inti dalam sistem politik demokratis, yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Pemilihan umum juga merupakan cara untuk menentukan arah kebijakan negara, mengukur dukungan terhadap partai politik, dan mengubah komposisi kekuasaan politik. Pemilihan umum dapat dilakukan untuk berbagai posisi politik, mulai dari tingkat lokal seperti dewan kota atau kabupaten, hingga tingkat nasional seperti parlemen atau presiden. Prosesnya melibatkan registrasi pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hasilnya menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau perwakilan rakyat untuk periode tertentu, serta seberapa besar dukungan yang dimiliki oleh partai politik atau kandidat tertentu. Dalam pemilihan umum, pemilih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan, seperti platform politik partai, rekam jejak kandidat, isu-isu terkini, dan kepercayaan pribadi. Mereka memberikan suara mereka berdasarkan keyakinan dan kepentingan mereka sendiri, serta harapan akan perubahan atau kontinuitas dalam pemerintahan. Pemilihan umum juga merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan politik mereka dan mengambil bagian aktif dalam proses demokrasi.

Di akhir materi, dijelaskan mengenai peran bersama Partai Politik dan Pemilihan Umum dalam proses politik. Partai politik menggunakan pemilihan umum sebagai mekanisme untuk memperoleh kekuasaan politik, sementara pemilihan umum memberikan warga negara kesempatan untuk mengeluarkan suara mereka tentang arah politik dan pemimpin yang mereka percayakan. Partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum untuk memenangkan dukungan publik, dan hasil dari pemilihan umum mencerminkan dinamika politik dan preferensi masyarakat pada saat itu. Hasilnya dapat mengubah komposisi kekuasaan politik, memengaruhi kebijakan negara, dan

menggambarkan dinamika politik yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi yang sehat, partai politik dan pemilihan umum harus berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Partai politik harus menghormati prinsip-prinsip demokrasi, mempromosikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, dan bertanggung jawab atas tindakan politik mereka. Pemilihan umum juga harus dijalankan dengan integritas tinggi, memberikan akses yang merata kepada semua pemilih, dan memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan.

Secara keseluruhan, partai politik dan pemilihan umum adalah dua pilar utama dalam sistem politik demokratis. Mereka menciptakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengambil keputusan tentang arah negara mereka, dan menjalankan kontrol terhadap kekuasaan politik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat dan memperbaiki partai politik dan pemilihan umum sebagai bagian integral dari demokrasi yang sehat dan inklusif.

c) Sosialisasi tentang Budaya Politik dan Partisipasi Politik

Budaya Politik dan partisipasi politik adalah dua konsep yang erat terkait dalam konteks sistem politik demokratis. Budaya politik merujuk pada nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan norma-norma yang mendefinisikan cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan politik. Sementara partisipasi politik mencakup berbagai cara di mana individu atau kelompok mengambil bagian dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui representasi. Pada sesi terakhir ini, materi disampaikan oleh Andri Irawan, S.Sos., M.Si. dalam pemaparannya dijelaskan bahwa budaya politik membentuk landasan bagi partisipasi politik dalam suatu masyarakat yang mencakup elemen seperti nilai politik, sikap politik, dan keyakinan politik. Budaya politik yang sehat dan inklusif menciptakan lingkungan yang

memungkinkan partisipasi politik yang aktif dan beragam. Ini melibatkan penghargaan terhadap pluralisme politik, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, dan pembangunan norma-norma yang mendukung proses politik yang transparan, adil, dan akuntabel. Sementara itu, dijelaskan lebih lanjut mengenai partisipasi politik yakni cara individu kelompok mengambil bagian dalam proses politik untuk memengaruhi kebijakan, mendukung kandidat atau partai politik tertentu atau menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Motivasi partisipasi politik bervariasi dari individu ke individu. Beberapa orang mungkin terinspirasi oleh keyakinan ideologis atau nilai-nilai politik tertentu, sementara yang lain mungkin dipengaruhi oleh isu-isu konkret dalam kehidupan mereka, seperti kebijakan ekonomi, lingkungan, kesehatan, atau keadilan sosial. Faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman politik sebelumnya, identitas kelompok, dan pengaruh sosial juga dapat memengaruhi tingkat dan jenis partisipasi politik seseorang. Budaya politik yang kuat dan inklusif dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik dalam suatu masyarakat. Misalnya, budaya politik yang menghargai kebebasan berbicara, mendukung perbedaan pendapat, dan menghormati pluralisme politik cenderung mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan beragam. Di sisi lain, budaya politik yang otoriter, tidak inklusif, atau korup dapat menghambat partisipasi politik dengan menekan suara-suara alternatif atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses politik.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, penting untuk membangun budaya politik yang mempromosikan partisipasi politik yang aktif, adil, dan beragam. Ini melibatkan pendidikan politik yang efektif, pemeliharaan kebebasan sipil, penghargaan terhadap keragaman pandangan politik, dan perlindungan terhadap hak-hak politik individu. Dengan memperkuat hubungan antara budaya politik yang inklusif dan partisipasi politik yang aktif, masyarakat

dapat membangun sistem politik yang lebih responsif, demokratis, dan mewakili kepentingan seluruh rakyat.



Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan Pendidikan politik selesai dilaksanakan, tim kembali melakukan wawancara dengan masyarakat peserta kegiatan terkait pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Pemahaman Politik serta pentingnya menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 80% peserta kegiatan sudah memahami dan memiliki kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik masyarakat.

4. CONCLUSION

Pendidikan politik bagi orang asli Papua merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mereka. Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan hanya sekadar penyampaian informasi tentang proses politik, tetapi juga merupakan alat untuk memberdayakan dan membangun pemahaman yang mendalam tentang hak-hak politik serta peran aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami sistem politik secara menyeluruh, masyarakat asli Papua dapat

lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan politik yang mencakup nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pemahaman akan kebijakan-kebijakan yang memengaruhi mereka secara langsung akan membantu menciptakan warga yang lebih sadar politik. Pentingnya meresapi pendidikan politik ke dalam konteks budaya lokal juga menjadi landasan yang tak terelakkan. Dengan menghormati dan memahami tradisi serta norma-norma budaya, pendidikan politik dapat menjadi alat yang lebih efektif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat asli Papua. Selain itu, pendidikan politik dapat menjadi sarana untuk membangun kepemimpinan di kalangan masyarakat asli Papua, memotivasi keterlibatan perempuan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama antargenerasi. Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya tentang pemahaman individu, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh bagi keterlibatan politik kelompok dan komunitas secara luas. Dalam rangka untuk mencapai partisipasi politik yang lebih besar, pendidikan politik perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan dan masyarakat secara menyeluruh. Melalui upaya bersama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, dapat diciptakan lingkungan pendidikan politik yang inklusif, relevan, dan memotivasi masyarakat asli Papua untuk turut serta dalam pembentukan masa depan politik mereka sendiri

5. REFERENCES

- Bermeo, N. (Ed.). 2020. *Democratic Accountability in Latin America*. Oxford University Press.
- Budiharjo, Miriam. 1999. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Gerring, J., Hoffman, M., & Zarecki, D. 2020. *Political Culture*. Cambridge University Press.
- Labolo, Muhadam, Dr. Dan Teguh Ilham, S.Stp. 2015. *Partai Politik Dan Sistem*

- Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McClosky, H. (1972). Political Participation. The Macmillan Company.
- Solossa, Jacobus P. 2005. Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI. Jakarta: Sinar Harapan.
- Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia.